



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN ENTIKONG

JALAN RAYA ENTIKONG KM. 5, KEC. ENTIKONG, KAB. SANGGAU
KALIMANTAN BARAT 78557, TELEPON (0564) 31845, FAKSIMILE (0564) 31846
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppmhkp.etk@kkp.go.id

Nomor : B.201/BPPMHKP.ETK/TU.330/V/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Undangan Koordinasi & Forum Konsultasi Publik

08 Mei 2026

Yth.
(Daftar Terlampir)

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik serta penyusunan rencana kerja pelayanan, Balai PPMHKP Entikong akan menyelenggarakan kegiatan Konsultasi Publik yang menghadirkan para pengguna layanan, Penyuluh Perikanan, tokoh masyarakat dan instansi terkait.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 12 Mei 2026
Waktu : 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : KNPM Desa Sungai Nyirih Kec. Selakau Kab. Sambas
Agenda :

1. Penyampaian Materi Forum Konsultasi Publik oleh Penyelenggara Pelayanan Publik
2. Diskusi dan Masukan dari Para Pemangku Kepentingan
3. Penyusunan Komitmen Bersama terhadap Peningkatan Pelayanan

Demikian disampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Entikong, 08 Mei 2026
Plt Kepala Balai PPMHKP
Entikong



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rahmat, S.Pi

Lampiran Surat

Nomor : B.201/BPPMHKP.ETK/TU.330/V/2026

Tanggal : 08 Mei 2026

DAFTAR LAMPIRAN

No. Nama / Instansi

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kalimantan Barat
2. Penyuluh Perikanan Kab. Sambas
3. Ketua KNMP Sungai Nyirih Kec Selakau, Kab. Sambas
4. Ketua KDMP Sungai Nyirih Kec Selakau, Kab. Sambas
5. Tokoh Masyarakat Setempat
6. Nelayan Anggota KNMP Sungai Nyirih Kec Selakau, Kab. Sambas



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN ENTIKONG**

JALAN RAYA ENTIKONG KM. 5, KEC. ENTIKONG, KAB. SANGGAU
KALIMANTAN BARAT 78557, TELEPON (0564) 31845, FAKSIMILE (0564) 31846
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppmhkp.etk@kkp.go.id

NOTULEN RAPAT FORUM KONSULTASI PUBLIK

Tanggal dan Waktu Rapat: 12 Mei 2025	Tempat Rapat: KNPM Kab Sambas
Pimpinan Rapat: Rahmat, S.Pi	Agenda Rapat: Penyusunan Standar Pelayanan
Daftar Peserta Rapat: 1. Inspektur Mutu BPPMHKP Entikong 2. Bapak Parda Situmorang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat 3. Anggota KDMP Kab Sambas 4. Penyuluh Perikanan Wilker Kab Sambas 5. Ibu Janawati dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat	

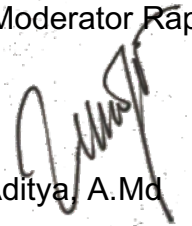
No	Agenda	Keterangan
1.	Penyampaian Materi Forum Konsultasi Publik (Help Desk) oleh Pihak BPPMHKP	Disampaikan tentang jenis-jenis layanan berdasarkan KepBadan Nomor 45 Tahun 2024 dan persyaratan serta prosedur pengajuan
2.	Diskusi dan Masukan dari Para Pemangku Kepentingan	1. Bapak Ihsan : sulitnya bagi nelayan kecil dalam memahami cara pengajuan permohonan secara online (OSS) dikarenakan keterbatasan tentang pemahaman teknologi. 2. Bapak Armansyah; Perlu adanya pendampingan mulai dari permohonan hingga pemenuhan Persyaratan untuk pengajuan

		3. Sulitnya pemenuhan standar persyaratan fasilitas dikarenakan minimnya pendanaan bagi Pelaku Usaha Perikanan
3.	Penyusunan Komitmen Bersama terhadap Peningkatan Pelayanan	Akan dibuatkan layanan Help Desk di Kantor BPPMHKP Entikong dalam melayani seluruh kesulitan para pelaku usaha. Pendampingan tata cara pendaftaran maupun dalam penyusunan dokumen-dokumen persyaratan.

Kesimpulan Rapat:

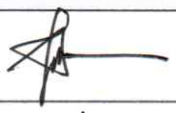
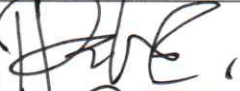
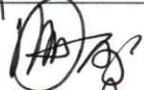
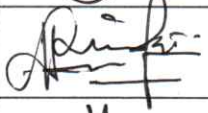
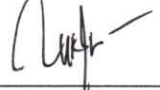
1. Ditekankan pentingnya pendampingan dalam pengajuan sertifikasi dan tata cara penyusunan dokumen mutu CPIB Kapal dan SKP, namun BPPMHKP Entikong juga melayani sertifikat HACCP, CPIB Benih dan CBIB dibidang budidaya serta CPOIB, CPPIB, SPDI, CDOIB.
2. Akan dibuatkan layanan help desk untuk memenuhi dan melayani pengguna layanan dalam proses pengajuan di kantor BPPMHKP Entikong.
3. Setiap rencana aksi dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi berkala setiap semester berjalan.

Sambas, 12 Mei 2026
Moderator Rapat


Aditya A.Md

DAFTAR HADIR
KOORDINASI DAN FORUM DISKUSI PUBLIK
TAHUN 2026

Tanggal : 12 Mei 2026

No	Nama	Instansi	TTD
1.	Iwan Satryawan	Luhkan BPPP Banyuw	
2.	armangyah, S.H.	anggota koder	
3.	Sana	anggota koder	
4.	ai amusi	anggota koder	
5.	Didit Gunawan		
6.	Felani Wijaya	Dap Prov Kelan	
7.	Rahmat	BPPMHK Entikong	
8.	Didin Anggoro Putra	BPPMHK Entikong	
9.	Riunt Eno .T	BPPMHK Entikong	
10.	Jannani	Dap prov.	
11.	Budiman	Luhkan BPPP Bny	
12.	LEO	Luhkan BPP Bnyuw	
13.	Ihsan	Luhkan BPP Bnyuw	
14.	Aditya	Bppmhk Citra	

Yang Mengabsen


 Aditya

**LAPORAN PELAKSANAAN
FORUM KOORDINASI PERCEPATAN PENERBITAN SERTIFIKASI DI
KNMP DESA SUNGAI NYIRIH, KECAMATAN SELAKAU KAB.
SAMBAS**



**BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN ENTIKONG
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KALIMANTAN BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Koordinasi Percepatan Penerbitan Sertifikasi KNMP di Desa Sungai Nyirih, Kec. Selakau, Kab, Sambas oleh BPPMHKP Entikong ini dapat terlaksana dengan baik.

Koordinasi Percepatan Penerbitan Sertifikasi KNMP di Desa Sungai Nyirih dilaksanakan sebagai salah satu bentuk komitmen BPPMHKP Entikong dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Melalui forum ini, kami membuka ruang dialog dan menerima masukan konstruktif dari para pengguna layanan, stakeholder, serta masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan harapan publik.

Laporan ini memuat rangkuman kegiatan, tanggapan dan permasalahan dari pengguna layanan, serta rekomendasi tindak lanjut yang akan dilakukan oleh BPPMHKP Entikong. Kami menyadari bahwa penyelenggaraan forum ini tidak lepas dari peran serta berbagai pihak, oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan instansi yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi yang berarti.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi acuan dalam upaya perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan di lingkungan BPPMHKP Entikong ke depan. Semoga upaya bersama ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

Entikong, 30 Mei 2026
Plt Kepala Balai PPMHKP Entikong



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rahmat, S.Pi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Tujuan dan Manfaat.....	4
1.3. Ruang Lingkup	5
BAB II METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN	6
2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	6
2.2. Penyelenggara Kegiatan	6
2.3. Metode Pelaksanaan Kegiatan.....	6
2.4. Susunan Acara Kegiatan	6
BAB III HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	7
3.1. Identifikasi Masalah	7
3.2. Analisis.....	7
3.3. Rencana Aksi.....	8
3.4. Dokumentasi.....	8
3.4.1. Dokumentasi Kegiatan	8
BAB IV PENUTUP	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu ke hilir, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan dua regulasi penting, yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Cara Penanganan Ikan yang Baik di Atas Kapal (CPIB Kapal) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KKP) Nomor 17/PERMEN-KP/2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan. Kedua regulasi tersebut menegaskan pentingnya pelaksanaan sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik di Atas Kapal (CPIB Kapal) dan Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan sebagai instrumen untuk menjamin kualitas dan keamanan produk perikanan sejak tahap produksi awal.

Sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki wilayah kerja strategis di perbatasan, Balai PPMHKP Entikong memiliki peran penting dalam mendorong percepatan penerbitan sertifikasi CPIB Kapal dan SKP di wilayah Kalimantan Barat. Koordinasi lintas wilayah dan sinergi dengan para penyuluh perikanan, PPN, Para Dinas KP Kabupaten dan Provinsi menjadi kunci untuk memastikan bahwa pelaku usaha perikanan mendapatkan pendampingan dan fasilitasi yang optimal dalam proses sertifikasi salahsatunya kegiatan di KNMP Desa Sungai Nyirih Kec. Sekalau, Kab. Sambas.

Melalui kegiatan koordinasi ini, diharapkan terbangun pemahaman bersama, kesepakatan teknis, serta strategi percepatan yang terintegrasi antara Balai PPMHKP Entikong dan para Koordinator Penyuluh Perikanan di tujuh kabupaten, yaitu Sintang, Sekadau, Sanggau, Bengkayang, Kapuas Hulu, Sambas, dan Melawi. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menyelaraskan langkah-langkah operasional di lapangan agar proses sertifikasi berjalan efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi peningkatan mutu hasil perikanan budidaya.

1.2. Tujuan dan Manfaat

Kegiatan Koordinasi Percepatan Penerbitan Sertifikasi CPIB Kapal dan SKP bertujuan untuk menyamakan persepsi teknis antara Balai PPMHKP Entikong dan para Koordinator Penyuluh Perikanan, PPN, Para Dinas KP Kabupaten dan Provinsi menyusun strategi kolaboratif dalam pendampingan pelaku usaha, serta mempercepat implementasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai regulasi terbaru. Melalui koordinasi ini, diharapkan tercipta sinergi lintas

wilayah yang mendukung efektivitas sertifikasi, meningkatkan kapasitas penyuluh sebagai fasilitator teknis, dan memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha dalam bentuk pendampingan yang terarah, peningkatan daya saing produk, serta akses pasar yang lebih luas melalui kepatuhan terhadap standar CPIB Kapal dan SKP.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan Kegiatan ini meliputi:

- a. Sinkronisasi regulasi
- b. Koordinasi antar instansi
- c. Percepatan sertifikasi CPIB Kapal dan SKP

BAB II

METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Koordinasi Percepatan Penerbitan Sertifikasi CPIB Kapal dan SKP dilaksanakan di Gedung Terbuka KNMP Desa Sungai Nyirih, Kec. Selakau, Kab Sambas pada tanggal 12 Mei 2026 pada pukul 10.00 WIB s.d. 15.00 WIB.

2.2. Penyelenggara Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan Koordinasi Percepatan Penerbitan Sertifikasi CPIB Kapal dan SKP, BPPMHKP Entikong bersama antara lain:

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
- b. Penanggung Jawab KNMP Sungai Nyirih
- c. Penyuluh Perikanan Kabupaten Sambas
- d. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sambas
- e. Tokoh Masyarakat
- f. Pelaku Usaha

2.3. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Koordinasi Percepatan Penerbitan Sertifikasi CPIB Kapal dan SKP dilaksanakan secara on site.

2.4. Susunan Acara Kegiatan

Susunan acara kegiatan Koordinasi Percepatan Penerbitan Sertifikasi CPIB Kapal dan SKP antara lain:

- a. Penyampaian materi Proses Penerbitan Sertifikasi CPIB Kapal dan SKP
- b. Diskusi dan Masukan dari para pemangku kepentingan

BAB III

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil kegiatan Koordinasi Percepatan Penerbitan Sertifikasi CPIB Kapal dan SKP bersama instansi terkait, ditemukan beberapa permasalahan dan masukan terkait proses sertifikasi antara lain sebagai berikut:

- a. Terbatasnya pemahaman pelaku usaha perikanan terhadap prosedur cara pengajuan sertifikasi CPIB Kapal dan SKP, terutama pada pelaku usaha mikro dan kecil.
- b. Terdapat kendala pemenuhan bukti dukung pada pengajuan SKP diantaranya pembuatan Panduan Mutu untuk SKP.
- c. Terdapat kendala administrasi dalam pemenuhan bukti dukung pada pengajuan sertifikat CPIB Kapal berupa Sertifikat SKPI (Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan) karena terbatasnya kepemilikan sertifikat pada individu dan pelatihan.

3.2. Analisis

- a. Terbatasnya pemahaman pelaku usaha Kapal dan UPI perikanan terhadap prosedur cara pengajuan sertifikasi CPIB Kapal dan SKP, terutama pada pelaku usaha mikro dan kecil.

Analisis:

- **Akar Masalah:** rendahnya pemahaman pengguna jasa dalam mengakses online terhadap prosedur pengajuan sertifikasi secara digital;
- **Dampak:** Menghambat proses sertifikasi CPIB Kapal dan SKP

- b. Terdapat kendala pemenuhan bukti dukung pada pengajuan SKP diantaranya pembuatan Panduan Mutu untuk SKP.

Analisis:

- **Akar Masalah:** Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam menyusun atau pembuatan panduan mutu.
- **Dampak:** Proses pengajuan sertifikasi SKP Pembenihan terhambat atau tertunda.

- c. Terdapat kendala administrasi dalam pemenuhan bukti dukung pada pengajuan sertifikat CPIB Kapal berupa Sertifikat SKPI (Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan) karena terbatasnya kepemilikan sertifikat pada individu dan pelatihan.

Analisis:

- **Akar Masalah:** Kurangnya personal atau individu di area wilayah kerja BPPMHKP Entikong yang memiliki sertifikat SKPI sebagai salah satu persyaratan bukti dukung pada pengajuan sertifikat CPIB Kapal.
- **Dampak:** Proses pengajuan sertifikasi CPIB Kapal terhambat atau tertunda.

3.3. Rencana Aksi

- a. Ditekankan pentingnya pendampingan dalam pengajuan sertifikasi dan tata cara penyusunan dokumen mutu CPIB Kapal dan SKP.
- b. Akan dibuatkan layanan help desk untuk memenuhi dan melayani pengguna layanan dalam proses pengajuan di kantor BPPMHKP Entikong.
- c. Pengumpulan atau pengkolektifan data kepemilikan sertifikat SKPI dan bekerjasama dengan instansi terkait untuk melaksanakan kegiatan pelatihan di area wilayah kerja BPPMHKP Entikong.

3.4. Dokumentasi

3.4.1. Dokumentasi Kegiatan

Berikut merupakan dokumentasi kegiatan Koordinasi Percepatan Penerbitan Sertifikasi CPIB Kapal dan SKP yang bertempat di Gedung Terbuka KNMP Desa Sungai Nyirih, Kec. Selakau, Kab Sambas.



PENUTUP

Kegiatan Koordinasi Percepatan Penerbitan Sertifikasi CPIB Kapal dan SKP yang dilaksanakan oleh Balai PPMHKP Entikong telah berjalan dengan lancar dan konstruktif. Melalui forum ini, terjalin komunikasi yang efektif antara Balai PPMHKP Entikong dan para Instansi terkait dan Penyuluh Perikanan dari kabupaten di wilayah kerja, yang menghasilkan kesepakatan teknis serta komitmen bersama untuk mempercepat proses sertifikasi sesuai regulasi terbaru. Diharapkan hasil koordinasi ini dapat ditindaklanjuti dalam bentuk pendampingan yang lebih terstruktur, pemetaan calon penerima sertifikasi, serta pelaporan yang terintegrasi. Sinergi yang terbangun menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan.